

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu instansi atau organisasi termasuk pemerintahan daerah. Sumber daya manusia saat ini bukan lagi sekedar alat untuk mencapai tujuan organisasi, tapi sudah merupakan aset yang penting dan dapat dikembangkan. Sehingga organisasi tidak hanya mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi tetapi lebih pada kinerja dalam proses pencapaiannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut sumber daya manusia bergerak secara aktif, kreatif dan inovatif. Seperti halnya instansi pemerintahan yang dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Latihan (BKPL) Kabupaten Lampung Selatan tentu membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan bernilai. Sesuai dengan visinya “terwujudnya pelayanan prima, aparatur yang bermoral, profesional dan sejahtera”.

Aparatur dan sumber daya yang lain dalam instansi juga harus secara bersama-sama mengembangkan kualitas kerja agar dapat membawa hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi berdasarkan pada mutu dan standar yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menempatkan pemerintah daerah untuk dapat lebih mandiri mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya manusianya, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menyesuaikan dengan semangat reformasi birokrasi.

Sumber daya manusia yang berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan yang akan menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi semua organisasi untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.

Penyelenggaraan pemerintahan seperti pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Lampung dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya bila didukung dengan adanya pengembangan sumber daya aparatur yang berbasis kompetensi. Hal ini perlu dilakukan karena dipandang sumber daya aparatur adalah penggerak utama aktivitas dalam pemerintahan

yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Dengan adanya kompetensi akan memberi fokus pada karakteristik personal (pribadi), yang dapat membantu seseorang menghasilkan kinerja yang baik terhadap pekerjaan yang diberikan.

Hal di atas juga dijelaskan oleh Spencer and Spencer (1993) dalam Setyowati, kompetensi didefinisikan sebagai *Underlying characteristic's of an individual which is causally related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation*. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. (<http://blog.ftb.itb.ac.id/usepm/wp-content/uploads/2010/03>)

Organisasi yang efektif akan mampu menghasilkan kinerja yang baik, dan sebaliknya organisasi yang tidak efektif cenderung mempunyai kinerja yang rendah. Kinerja aparatur yang maksimum dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah kompetensi aparatur.

Kompetensi aparatur merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki sesuai dengan persyaratan analisa jabatan, diharapkan aparatur yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

Seperti halnya yang diterangkan oleh Hutapea dan Thoha (2008: 86), bahwa sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan membangun orang-orang yang bekerja sesuai dengan tuntutan

pekerjaannya dan akan selalu siap menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan organisasi tanpa menghilangkan jati dirinya.

Organisasi hidup di dalam lingkungan yang dinamis yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Untuk hal ini, organisasi harus senantiasa melakukan upaya-upaya yang dapat memperkokoh eksistensinya. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan selalu memberikan nilai tambah bagi lingkungannya melalui penyampaian berbagai macam *ouput* yang dihasilkannya. Upaya ini hanya dimungkinkan jika organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten.

Realitanya, kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tidaklah selalu sesuai dengan apa yang dituntut untuk keberhasilan sebuah pekerjaan. Melalui penelitian yang telah dilakukan Peneliti menunjukkan kondisi *real* di lapangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Lampung Selatan dimana terdapat beberapa aparatur menempati suatu posisi jabatan yang kurang sesuai dengan pendidikan/latar belakang disiplin ilmu yang mereka miliki. Selama ini yang menjadi tumpuan utama penentuan jabatan hanya didasarkan pada penelaahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan ketentuan normatif administratif, seperti terpenuhinya golongan ruang dan kepangkatan, namun kurang memperhatikan kompetensi masing-masing aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi penempatan pegawai berbasis kompetensi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Lampung Selatan belum maksimal dan kurang menjadi prioritas instansi yang pada

akhirnya berdampak pada kinerja dari masing-masing aparatur dalam melaksanakan beban kerjanya di dalam instansi.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Kepmendagri Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Pembinaan Karir telah mengamanatkan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Kompetensi yang dimaksud seperti penjelasan di atas adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Mengingat pentingnya peran sumber daya aparatur sebagai penggerak aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berdasarkan fakta di lapangan, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penyebab dari belum maksimalnya implementasi pengembangan sumber daya aparatur berbasis kompetensi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu dapat diketahui pula dampak yang terjadi apabila aparatur dalam instansi tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan beban kerja yang diembannya. Hal ini terkait dengan visi dan misi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung

Selatan untuk melakukan pengembangan dalam menciptakan aparatur yang profesional dan bermoral demi tercapainya pelayanan prima.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Mengapa Implementasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah Berbasis Kompetensi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan belum maksimal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab belum maksimalnya implementasi dari pengembangan sumber daya aparatur daerah berbasis kompetensi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu sosial dan politik dalam pengembangan manajemen pemerintahan, khususnya kajian mengenai pengembangan sumber daya aparatur berbasis kompetensi pada instansi pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait, yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Latihan (BKPL) Kabupaten Lampung Selatan sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pengembangan sumber daya aparatur berbasis kompetensi.